

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Peran

Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor.¹ Mengingat luasnya tujuan bimbingan dan konseling bagi para siswa, tidak dapat dibantah bahwa guru memiliki peranan yang amat besar di bidang bimbingan dan konseling. Secara garis besarnya peran guru termasuk guru bimbingan dan konseling adalah mengkoordinir keberhasilan bimbingan dan konseling disamping kegiatan administrasi dan kurikulum (akademik).

Artinya, maju mundurnya bimbingan dan konseling di sebuah sekolah menjadi tanggung jawab guru dan guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik, tidak terkecuali peserta didik tuna netra yang secara fisik memiliki keterbatasan. Karena itu secara praktis peran guru bimbingan dan konseling di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan karir atau kreativitas siswa.²

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan

¹ Prajudi, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022, h. 558

² Miftachul Huda, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022, h. 558

pada keinginan lingkungannya.

Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:³

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

2. Peran Dinas Sosial

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan terkait perilaku, kedudukan dalam masyarakat, kedudukan pribadi maupun dalam kelompoknya. Peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis dapat diwujudkan dalam bentuk koordinasi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmanai, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.⁴

Peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis adalah sebuah tugas pokok struktur organisasi yang berkaitan dengan masalah sosial baik gelandangan, pengemis dan masalah

³ Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022, h. 558

⁴ Soekanto, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022, h. 3

sosial lainnya. Dimana dalam penanganannya perlu bekerja sama dengan Satpol PP untuk merazia gelandangan dan pengemis.

Dinas sosial juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam penyelesaian masalah pengemis. Adapun beberapa dukungan pemerintah diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:⁵

- 1) Sarana dan prasarana di rumah singgah sementara
- 2) Sumber daya manusia sebagai pengelola rumah singgah sementara
- 3) Keterlibatan Satpol PP dan Dinas Syariat Islam

B. Bimbingan dan Konseling Bagi Populasi Khusus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi dari populasi adalah sejumlah orang atau pribadi yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dalam bidang penelitian, istilah populasi juga kerap digunakan sebagai suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa populasi dalam konteks ini merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan karakteristik dan kualitas tertentu. Kumpulan individu secara kuantitas bermakna dua orang atau lebih. Dengan kata lain, dua orang atau lebih diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai individu-individu yang memiliki karakteristik yang serupa antar satu sama lain. Misalnya populasi perkotaan, yang diklasifikasikan sebagai kumpulan individu yang memiliki kebiasaan hidup dan mata pencaharian yang serupa.⁶

Dalam kaitannya dengan populasi khusus, sekelompok orang yang diidentifikasi dengan bukti-bukti empiris tertentu atau dalam karakteristik yang membedakan mereka dari orang-orang pada umumnya. Apa pun yang membuat seseorang terlihat atau

⁵ Cut Zamharira, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022, h. 3

⁶ Sugiono, *Bimbingan dan Konseling Populasi Khusus di Institusi Pendidikan*, Cetakan Pertama: Juli 2018, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama), h. 3

berperilaku berbeda dari orang lain membuat satu kekhususan.⁷ Definisi ini sejalan dengan pemaparan setiap istilah yang dikemukakan sebelumnya, sehingga populasi khusus dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang sama-sama memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan individu-individu lain pada umumnya, dimana karakteristik maupun ciri tersebut akan membentuk suatu identitas kekhususan bagi diri individu tersebut.

Hal ini yang membuat istilah anak berkebutuhan khusus sedikit berbeda dengan populasi khusus. Anak berkebutuhan khusus dimaknai secara individual memiliki perbedaan karakteristik fisik, emosi, dan intelektual dengan anak lainnya. Namun populasi khusus bermakna lebih luas yang mencakup di dalamnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dalam kalimat lain, sekumpulan anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari populasi khusus karena karakteristik kekhususan yang dimiliki serupa.

1. Bimbingan dan Konseling bagi Gelandangan dan Pengemis

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yang mana di dalamnya konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya dapat menyediakan situasi belajar yang efektif dan kondusif. Dalam hal ini konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadinya maupun masyarakat.⁸

Konseling secara epistemologi diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan bertukar pikiran kepada klien agar memahami atau mengerti tentang hal yang sedang dialaminya.⁹ Konseling adalah suatu hubungan yang

⁷ Yakubu, *Bimbingan dan Konseling Populasi Khusus di Institusi Pendidikan*, Cetakan Pertama: Juli 2018, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama), h. 3

⁸ Radhiya Bustan, Djufri Halim, Pelayanan Konseling pada Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bangun Daya I - Kedoya Jakarta Barat, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, h. 161

⁹ M. Arifin, Pelayanan Konseling pada Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bangun Daya I - Kedoya Jakarta Barat, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 1, No. 3,

bebas dan berstruktur yang membiarkan klien memperoleh pengertian sendiri yang membimbingnya untuk menentukan langkah-langkah positif ke arah orientasi baru.¹⁰

Pelayanan konseling secara umum memiliki fungsi kuratif dan preventif. Kuratif berarti membantu klien saat bermasalah dan miskin menghadapinya. Sedang preventif berarti mengatasi masalah dan mencegah masalah yang telah terjadi maupun yang sedang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga siap menghadapinya serta tidak mengganggu dirinya atau lingkungannya.

2. Gelandangan dan Pengemis dan Penyebabnya

Kerasnya kehidupan yang kian lama menuntut seseorang untuk berjuang lebih dalam mempertahankan hidup demi meraih kesejahteraan. Kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat membuat individu tersebut harus melakukan berbagai usaha untuk dapat memenuhinya. Terutama kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ketika kebutuhan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi, maka akan menjadikan seseorang miskin. Kondisi kemiskinan ini tak jarang memaksa seseorang untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhannya, salah satunya dengan jalan mengemis. Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1980 dijelaskan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapka belas kasihan orang lain.¹¹

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yang berujung pada pemilihan keputusan untuk

Maret 2012, h. 161

¹⁰ Rogers, Pelayanan Konseling pada Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bangun Daya I - Kedoya Jakarta Barat, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol . 1, No. 3, Maret 2012, h. 16

¹¹ Indah Dwi Lestari, dkk. Peningkatan Self Awareness pada Pengemis Melalui Konseling Islam Berbasis Pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy, *Jurnal Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling* 324 Vol. 2, (2022), h.324

menjadi pengemis adalah pendidikan yang terlampau rendah, sikap malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan beban keluarga. Penyebab terjadinya kemiskinan yang meliputi:¹²

a. Kemiskinan ekonomi

Kemiskinan secara ekonomi dapat diartikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi individu dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau pendapatannya dibawah garis kemiskinan.

b. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah faktor yang penyebabnya berasal dari dalam, budaya atau kultur negatif masyarakat itu sendiri, seperti perilaku malas, tidak disiplin, pasrah, dan tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidupnya.

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak stabil, praktek korupsi, kolusi dan tatanan ekonomi yang hanya membandingkan pihak tertentu.

Pendapat ahli di atas dapat diartikan bahwa latar belakang seseorang penyebab intern seperti rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, sikap mental, keadaan fisik (cacat tubuh), usia lanjut dan rendahnya kemampuan ekonomi. Kemudian penyebab ekstern atau bersumber dari luar diri seperti kondisi lapangan pekerjaan yang minim, terbatasnya akses informasi, daya dukung lingkungan, dan keluarga (pengemis warisan).

Pengamin dan Pengemis adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup

¹² Mustaqim, Peningkatan Self Awareness pada Pengemis Melalui Konseling Islam Berbasis Pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy, *Jurnal Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling* 324 Vol. 2, (2022), h.324

mengembara di tempat umum.⁵ Pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Permasalahan gelandangan dan pengemis sebenarnya hanyalah turunan dari permasalahan kemiskinan. Selama persoalan kemiskinan belum teratasi, jumlah gelandangan dan pengemis tidak akan pernah berkurang, malah jumlahnya akan semakin bertambah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 (pasal 2), kebijakan di bidang penanggulangan gelandangan dan pengemis merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah, dalam menetapkan kebijakan tersebut Menteri dibantu oleh sebuah badan koordinasi yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan keputusan presiden. Penertiban pengemis telah diatur dalam Kepres Nomor 40 tahun 1983 Tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dalam keputusan bersama antara Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Sosial dengan nomor SKB. 102/MEN/1983 tentang penyelenggaraan Transmigrasi yang dikaitkan dengan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis

Kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial dari tiga sudut pandang yakni kebijakan sosial sebagai proses, sebagai produk, sebagai kinerja atau capaian (*performance*).¹³ Sebagai suatu proses,

¹³ Feliksya Weda Piran, Upaya Pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pengemis dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022, h. 608

kebijakan sosial menunjuk pada tahapan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik dan teknik metodologis. Kebijakan social merupakan suatu tahapan untuk membuat sebuah rencana tindakan (*plan of action*) yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan (*assessing need*), penetapan alternatif-alternatif kebutuhan tindakan, penyeleksian strategi-strategi kebijakan, sampai pada evaluasi terhadap pengimplementasian kebijakan. Kebijakan proses ini sebagai pengembangan kebijakan (*policy development*) yang maknanya menunjuk pada proses perumusan kebijakan (*policy formulation*).¹⁴

Melihat kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni menyangkut bidang kesejahteraan sosial, di mana pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral. Pembangunan kesejahteraan rakyat ini selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literature mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Oleh karena itu, di Indonesia kesejahteraan sosial, secara luas merujuk pada pembangunan sosial, sedangkan secara sempit mengacu pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan.¹⁵

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan keterlibatan stake holder. Kebijakan jangan sampai mengaburkan tingkat keterlibatan stakeholder. Ide kebijakan hendaknya melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan karena kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya harus

¹⁴ Maria Pratiknjo, Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis, *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN (p) 1907- 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 717 – 726, h. 722.

¹⁵ Nurdin, Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis, *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN (p) 1907- 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 717 – 726, h. 723.

dikerjakan, bukan apa g diusulkan dalam kegiatan.

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa sejatinya Negara kesejahteraan adalah bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran agar terhindar dari gilasan mesin kapitalisme.

1. Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Semakin padat jumlah penduduk disuatu kota maka semakin besar pula persaingan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena tidak semua masyarakat mampu bersaing demi memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akibatnya demi mencari kebutuhan sebagian masyarakat rela turun ke jalan menuju tempat-tempat umum dengan meminta-minta. Semakin bertambahnya jumlah pengemis, ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Keberadaan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait dengan masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan. Banyak faktor yang melatar belakangi seseorang memutuskan untuk megemban profesi sebagai pengemis.¹⁶

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, faktor-faktor munculnya pengemis dapat disebabkan karena:

a. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya

¹⁶ Hardiman dan Midgley, Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis, *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN (p) 1907- 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 717 – 726, h. 722.

tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

b. Masalah Pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego priadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Pengemis turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.

c. Masalah Keterampilan

Kerja Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

d. Masalah sosial budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

e. Masalah harga diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata.

f. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap pasrah dan nerimo pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan.

g. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan.

Beberapa faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis memperlihatkan kuatnya tradisi dan kebiasaan yang kurang tepat dijadikan sebagai pedoman hidup karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penarik Bagi Gelandangan dan Pengemis

Besar pendapatan yang diperoleh dari kegiatan mengemis merupakan daya tarik yang cukup besar bagi para pengemis maupun anak jalanan untuk melakukan kegiatan tersebut. Meskipun besar pendapatan yang diperoleh per harinya juga tidak sama, akan tetapi rata-rata para pengemis dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp. 40.000. Menurut kepala Satpol PP Kota

Bengkulu, dari hasil penyidik Satpol PP beberapa penangkapan terhadap pengemis setiap harinya mendapatkan hasil di Lampu Merah sekitar Rp. 50.000- Rp. 100.000.¹⁷



¹⁷ Dwiyantri Hanandini, Machdaliza, Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Padang dan Bukittinggi, Jurnal Sosiologi Andalas, Volume XI, No. 2, 2011. H.179